



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 telp. 0536 - 3224547 Palangka Raya

RENCANA AKSI
PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

A. Target Realisasi Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Satuan	Waktu Pelaksanaan				Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	3,43	persen	1,25	1,25	2,34	3,43	
2.	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	28,89	persen	35,56	35,56	35,56	35,56	Capaian sudah melampaui target 2020, Karena periode masa kerja selama 5 tahun mulai 2019-2024
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	33,46	persen	33,39	33,41	33,45	33,46	
3.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,0151	rasio	1,9447	1,3015	0,6583	0,0151	
4.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	100	persen	25	50	75	100	

5.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	42,86	persen	35,71	38,09	41,48	42,86	
		Rasio anak korban kekerasan	0,0151	rasio	0,0213	0,0192	0,0172	0,0151	
6.	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	100	persen	25	50	75	100	
7.	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	15,56	persen	11,11	12,59	14,08	15,56	
8.	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	B+ / BB	skor	B+	B+	B+	B+	
9.	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	2,24	Total Fertility Rate (TFR)	2,28	2,28	2,26	2,24	
10.	Meningkatnya akseptor KB peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Rasio pemakaian kontrasepsi	0,834	rasio	0,815	0,821	0,828	0,834	
11.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	16,61	persen	18,51	17,88	17,24	16,61	

B. Target Realisasi Keuangan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target Keuangan (Rp.)				Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			23.317.338.689	3.431.548.841	6.614.309.817	7.345.753.910	5.925.726.122	
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah			19.810.666.689	2.602.057.934	4.954.185.722	6.727.611.410	5.526.811.622	
1.		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		189.146.812	65.998.212	74.445.000	-	48.703.600	
a.			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.866.500	3.660.000	6.525.000	-	16.681.500	
b.			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.300.000	3.615.000	5.490.000	-	9.195.000	
c.			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.502.312	13.216.312	41.536.000	-	12.750.000	
d.			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.478.000	45.506.900	20.894.000	-	10.077.100	
2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.738.080.889	1.938.525.222	1.934.645.222	1.943.765.222	1.921.145.222	
a.			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.684.580.889	1.921.145.222	1.921.145.222	1.921.145.222	1.921.145.222	
b.			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.500.000	8.500.000	-	-	-	

c.			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	45.000.000	8.880.000	13.500.000	22.620.000		
3.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		17.600.000	-	-	17.600.000	-	
a.			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	17.600.000	-	-	17.600.000		
4.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6.350.000	3.175.000	3.175.000	-	-	
a.			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.350.000	3.175.000	3.175.000	-	-	
5.		Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.089.163.188	108.235.500	1.817.029.000	115.466.688	48.432.000	
a.			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	3.250.000	6.750.000	-	-	
b.			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.753.163.500	46.174.500	1.675.449.000	31.540.000		
c.			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		8.500.000	17.000.000	8.511.000		
d.			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.762.000	5.445.000	10.890.000	-	5.427.000	
e.			Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	3.000.000	9.000.000	-	3.000.000	
f.			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.830.688	38.166.000	77.249.000	75.415.688	-	

g.			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	64.396.000	3.700.000	20.691.000	-	40.005.000	
6.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		8.203.750.000	100.468.000	707.652.500	4.247.856.000	3.147.773.500	
a.			Pengadaan Mebel	703.750.000	-	703.750.000	-	-	
b.			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000.000	100.468.000	3.902.500	4.247.856.000	3.147.773.500	
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.446.769.000	361.696.000	362.696.000	388.023.500	334.353.500	
a.			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.005.000	1.005.000	2.005.000	995.000	-	
b.			Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	105.350.000	26.337.500	26.337.500	52.675.000	-	
c.			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.337.414.000	334.353.500	334.353.500	334.353.500	334.353.500	
8.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		119.806.800	23.960.000	54.543.000	14.900.000	26.403.800	
a.			Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.806.800	6.561.000	9.843.000	-	16.402.800	

b.			Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	9.999.000	30.000.000	-	10.001.000	
c.			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	2.400.000	7.200.000	2.400.000	-	
d.			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	-	
e.			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	3.000.000	4.500.000	7.500.000	-	
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			1.585.000.000	355.000.000	555.000.000	375.000.000	300.000.000	
1.		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		215.000.000	165.000.000	50.000.000	-	-	
a.			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	90.000.000	90.000.000	-	-	-	
b.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	75.000.000	75.000.000	-	-	-	

c.			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	50.000.000	-	50.000.000	-	-	
2.		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi		1.170.000.000	190.000.000	305.000.000	375.000.000	300.000.000	
a.			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1.060.000.000	190.000.000	305.000.000	375.000.000	190.000.000	
b.			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	110.000.000	-	-	-	110.000.000	
3.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		200.000.000	-	200.000.000	-	-	

a.			Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	200.000.000	-	200.000.000	-	-	
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			944.068.000	211.222.000	436.506.000	243.142.500	53.197.500	
1.		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		323.000.000	110.000.000	177.500.000	-	35.500.000	
a.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	110.000.000	110.000.000	-	-	-	
b.			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	213.000.000	-	177.500.000	-	35.500.000	
2.		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		571.068.000	51.222.000	259.006.000	243.142.500	17.697.500	

		dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
a.			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	471.068.000	29.772.000	219.603.500	221.692.500	-	
b.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	100.000.000	21.450.000	39.402.500	21.450.000	17.697.500	
3.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		50.000.000	50.000.000	-	-	-	
a.			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	-	-	-	
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			227.500.000	27.000.000	200.500.000	-	-	

1.		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		75.000.000	-	75.000.000	-	-
a.			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	75.000.000	-	75.000.000	-	-
2.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		92.000.000	27.000.000	65.000.000	-	-
a.			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	65.000.000	-	65.000.000	-	-
b.			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	27.000.000	27.000.000	-	-	-
3.		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG		60.500.000	-	60.500.000	-	-

		dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
a.			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	60.500.000	-	60.500.000	-	-	
V.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			150.104.000	27.299.407	77.399.595	-	45.405.000	
1.		Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		150.104.000	27.299.407	77.399.595	-	45.405.000	
a.			Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	80.104.000	27.299.407	37.054.595	-	15.750.000	
b.			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	70.000.000	-	40.345.000	-	29.655.000	
VI.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			500.000.000	178.000.000	322.000.000	-	-	

1.		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		260.000.000	178.000.000	82.000.000	-	-	
a.			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	82.000.000	-	82.000.000	-	-	
b.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	178.000.000	178.000.000	-	-	-	
2.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		240.000.000	-	240.000.000	-	-	
a.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	240.000.000	-	240.000.000	-	-	
VII.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			100.000.000	30.969.500	68.718.500	-	312.000	

1.		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		100.000.000	30.969.500	68.718.500	-	312.000	
			Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	100.000.000	30.969.500	68.718.500	-	312.000	
B.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			400.000.000	110.000.000	240.000.000	-	50.000.000	
I.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			75.000.000	35.000.000	40.000.000	-	-	
1.		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		75.000.000	35.000.000	40.000.000	-	-	
a.			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	35.000.000	35.000.000	-	-	-	

b.			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	40.000.000	-	-	40.000.000	-	
II	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			150.000.000	75.000.000	-	75.000.000	-	
1.		Pengembangan Desain Program. Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		150.000.000	75.000.000	-	75.000.000	-	
a.			Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	75.000.000	75.000.000	-	-	-	
b.			Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan	75.000.000	-	-	75.000.000	-	

			Reproduksi						
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			175.000.000	-	-	125.000.000	50.000.000	
1.		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		175.000.000	-	-	125.000.000	50.000.000	
a.			Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	125.000.000	-	-	125.000.000	-	
b.			Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	50.000.000	-	-	-	50.000.000	